

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuatan model ASB yang dilakukan untuk kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat di Kabupaten LPK menghasilkan persamaan regresi $Y=1.897.542+20.678 X$.
2. Hasil verifikasi kewajaran dengan model ASB yang disusun untuk kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat di Kabupaten LPK, didapatkan 2 SKPD yang memiliki ketidakwajaran anggaran. Sedangkan 36 SKPD lainnya dikategorikan wajar dalam menganggarkan belanjanya untuk kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat.
3. Analisis perbandingan penilaian kewajaran antara Kabupaten LPK dan Kabupaten SS adalah sebagai berikut:
 - a. Model ASB untuk Kabupaten LPK adalah $Y=1.897.542+20.678X$. Sedangkan pada Kabupaten SS adalah $Y=3.035.031+589X$. Kabupaten LPK efisiensi dalam belanja tetap dibandingkan Kabupaten SS, sedangkan belanja variabel Kabupaten jauh lebih efisien dari Kabupaten LPK.
 - b. Penilaian kewajaran antara Kabupaten LPK dan Kabupaten SS didapatkan 2 SKPD yang memiliki ketidakwajaran anggaran pada Kabupaten LPK sedangkan pada Kabupaten SS semua SKPD telah menganggarkan anggaran secara wajar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian ini masih jauh dari kemampuan dan memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, diharapkan keterbatasan ini dapat diperhatikan oleh peneliti ini dimasa yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk satu jenis kegiatan saja yaitu kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat
2. Sulitnya memperoleh data untuk penelitian ASB.
3. Penelitian ini hanya menggunakan metode *Ordinary Least Square* (Regresi Sederhana) dalam menghitung ASB.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah LPK dan Pemerintah Daerah SS dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan/rujukan dalam mengevaluasi jenis kegiatan lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah LPK dan Pemerintah Daerah SS agar segera mengimplementasikan ASB yang telah disusun oleh tim ahli sehingga akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektifitas anggaran dengan cara membuat dan menetapkan draft peraturan bupati agar ASB memiliki kekuatan hukum yang sah dan jelas.
3. Pemerintah Daerah LPK dan Pemerintah Daerah SS hendaknya mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk

merumuskan dan mengevaluasi ASB mengingat ASB dipengaruhi oleh beberapa hal seperti standar harga dan fluktuasi ekonomi.

4. Untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian serupa untuk kegiatan yang berbeda.

